

**EVALUASI KEGIATAN DIGITALISASI ARSIP PERTANAHAN
DAN INTEGRASINYA DENGAN PETA BIDANG TANAH
MENUJU PELAYANAN *ONLINE*
(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen Pertanahan



Disusun oleh:

FITRIANINGSIH

NIM. 16252980/ Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
INTISARI.....	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah.....	5
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D Kajian Terdahulu	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A Kerangka Teoritis	9
1. Evaluasi	9
2. Integrasi	11
3. Arsip	13
4. Arsip Pertanahan.....	15
5. Arsip Elektronik	18
6. Pelayanan <i>online</i>	19

7. Digitalisasi	20
8. Peta Bidang Tanah.....	21
9. Pengelolaan Dokumen Elektronik.....	22
B Kerangka Pemikiran	25
C Pertanyaan Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Format Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	30
D. Definisi Operasional Konsep.....	31
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	32
1. Jenis dan Sumber Data	32
2. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV PROFIL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN.....	37
KARANGANYAR	37
A. Lokasi	37
B. Visi dan Misi	37
C. Tugas dan Fungsi.....	38
D. Sarana & Prasarana.....	39
E. Kepegawaian.....	39
F. Volume Pekerjaan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.....	42
G. Kondisi Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.....	44
BAB V DIGITALISASI ARSIP PERTANAHAN	47
A Digitalisasi Arsip Pertanahan Sebelum 2020	47
1. Warkah Pertanahan.....	47
2. Kondisi Digitalisasi GU tahun sebelumnya.....	48
B Digitalisasi Arsip Pertanahan	50
1. PTSL Tahun 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.....	50
2. Kegiatan Digitalisasi Arsip Pertanahan Tim Sloka	62
3. Kegiatan Digitalisasi Arsip Pertanahan Tim Infrastruktur Pertanahan	77

C	Layanan Pertanahan Elektronik.....	84
BAB VI EVALUASI DIGITALISASI ARSIP PERTANAHAN.....		87
A	Tahapan Kegiatan.....	87
1.	Tahap Digitalisasi Berkas <i>Non</i> – PTSL.....	89
2.	Tahap Digitalisasi Berkas PTSL.....	90
3.	Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan.....	94
B	Sumber Daya Manusia.....	118
C	Sarana dan Prasarana.....	121
1.	Komputer/ laptop.....	121
2.	<i>Scanner</i>	122
3.	<i>Media Backup</i> data.....	124
4.	<i>Bandwidth</i>	124
D	Pendanaan.....	127
E	Warkah Hasil Digitalisasi Tahun 2011.....	127
F	Peta Bidang Tanah.....	129
G	Keterkaitan antara Peta Bidang Tanah dengan Digitalisasi Arsip Pertanahan 132	
H	Manfaat Digitalisasi Arsip Pertanahan.....	133
I	Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan.....	136
BAB VII PENUTUP.....		141
A	Kesimpulan.....	141
B	Saran.....	142
Daftar Pustaka.....		143

ABSTRACT

The Ministry of ATR / BPN is trying to make land services online in the era of the industrial revolution 4.0. This effort is constrained by the difficult conditions of searching for land records, especially with the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL). Therefore, land archives and circulars were digitized for standardization of digitization of documents. The Land Office of Karanganyar Regency has digitized the land archives, so it is necessary to evaluate the digitization of land archives and their integration with the map of land parcels. The research objective is to evaluate the implementation of digitizing land archives and its integration with land parcels into online services. The research method is a qualitative method with a descriptive approach. The result of the research is that there is an unsynchronized implementation of digitizing land archives at the Karanganyar Regency Land Office with Circular Number 5 / SE-100.TU.02.01 / VIII / 2019 concerning Standardization of Digitization of Marks, asynchronous digitization of land archives in the Karanganyar Regency Land Office with this Circular Letter. one of them is because human resources do not have knowledge of archives (archivists), digitizing land archives can minimize problems related to the difficulty of searching for land archives, there has been no integration between digitizing land archives with land parcels to get online services.

Keywords: *Evaluation of Land Archives Digitalization , Integrated Land Plots Map, towards Online Services.*

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Dunia telah memasuki era baru yang dikenal dengan era revolusi industri 4.0. Era dimana segala sesuatunya sudah tidak lagi dikerjakan oleh tangan manusia, semua sudah dilakukan secara otomatisasi oleh mesin. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuat suatu peta jalan dan strategi Indonesia untuk menghadapi tantangan dunia dari revolusi industri 4.0 ini. Peta yang diberi nama *Making Indonesia 4.0* ini memberikan arah bagi pergerakan industri nasional di masa depan. Jokowi menjadikan *Making Indonesia 4.0* itu sebagai salah satu agenda nasional Indonesia. Sejalan dengan Agenda Nasional *Indonesia Making Indonesia 4.0*, dalam RPJMN 2020-2024 ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Salah satunya adalah tata kelola pemerintahan yang baik dimana yang menjadi fokus tujuan adalah tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan yang menerapkan e-Arsip terintegrasi.

Baru mulai menentukan strategi menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, Indonesia kembali dihadapkan pada masalah EoDB. Pada 24 Oktober 2019, *World Bank Group* (WBG) kembali merilis Laporan Kemudahan Berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) 2020 yang berjudul "*Doing Business 2020*". Laporan tersebut menyebutkan bahwa Indonesia tetap menempati peringkat 73 dari 190 negara. Indonesia peringkatnya tetap, tetapi terjadi peningkatan skor pada indeks dari 67,96 pada tahun lalu menjadi 69,6. Peningkatan indeks ini dikarenakan Bank Dunia menyoroti bahwa telah dilakukan reformasi yang mendukung

kemudahan bisnis di Indonesia antara lain proses untuk memulai bisnis, urusan perpajakan, hingga kegiatan perdagangan lintas batas. Menyikapi hal ini, dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan bahwa EoDB Indonesia naik lagi pada peringkat ke 40.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang turut berperan dalam mendukung program-program pemerintah yang menjadi agenda nasional di era revolusi industri 4.0 dan EoDB. Salah satu agenda nasional di bidang pertanahan, Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017 mencanangkan pensertipikatan tanah secara besar – besaran melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Kementerian ATR/BPN sebagai pelaksana dari program PTSL ini telah membuktikan mampu menerbitkan sertipikat sesuai target bahkan melebihi. Berikut adalah rinciannya.

Tabel 1. Pencapaian PTSL tahun 2017-2020

No	Tahun	Target (Bidang)	Capaian (Bidang)
1	2017	5 juta	5,2 juta
2	2018	7 juta	9,4 juta
3	2019	9 juta	11,2 juta
4	2020	10 juta	Masih berjalan

Sumber : setneg.go.id dan atrbpn.go.id

Banyaknya kuantitas *output* sertipikat hasil PTSL yang dihasilkan oleh Kementerian ATR/BPN ini, akan sebanding juga dengan banyaknya arsip pertanahan yang dihasilkan. Sebut saja warkah PTSL, Buku Tanah, Surat Ukur yang dihasilkan. Sebagai gambaran, jumlah warkah untuk pendaftaran PTSL minimal 25 lembar, Buku Tanah 1 (satu) lembar, Surat Ukur 1 (satu) lembar, Gambar Ukur 1 (satu) Lembar, peta bidang tanah 1 (satu) lembar. Bisa dikalkulasikan secara minimal bahwa 1 (satu) bidang

tanah memuat arsip 28 lembar. Bisa dibayangkan dan dihitung berapa banyak arsip pertanahan yang dihasilkan dari program PTSL ini.

Permasalahan arsip pertanahan sebelum adanya PTSL adalah sulitnya mencari keberadaan arsip pertanahan yang akan dicari. Bahkan terdapat slogan bahwa yang dicari tidak ada, yang tidak dicari ada. Hal ini menunjukkan bahwa arsip sebelum adanya kegiatan PTSL sudah menimbulkan masalah tersendiri. Contoh nyata adalah di Seksi Infrastruktur Pertanahan, ketika ada permohonan pengembalian batas dan ukur ulang. Permohonan ini pasti memerlukan Gambar Ukur. Tetapi sering kali, ketika dicari Gambar Ukur ini tidak ada. Inilah yang menyebabkan banyak petugas ukur kesulitan, hingga akhirnya menyisihkan tugas ini. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan juga mengalami kesulitan ketika mencari warkah untuk penanganan suatu kasus. Kesulitan pencarian ini terjadi ketika awal proses dan dalam berjalannya proses.

Beberapa gambaran permasalahan di atas muncul sebelum adanya program PTSL ketika kuantitas permohonan masih sedikit. Bisa dibayangkan dengan adanya program PTSL ini, arsip pertanahan makin sulit untuk dicari. Akibatnya banyak kegiatan yang tidak dapat terselesaikan hingga jadi tunggakan yang akan terjadi. Kementerian ATR/BPN telah melakukan upaya guna mengantisipasi berbagai masalah terkait arsip pertanahan dan tuntutan perkembangan zaman dengan melakukan digitalisasi arsip pertanahan pada tahun 2010 an. Tetapi mulai kembali digalakkan melalui kegiatan PTSL. Saat ini kegiatan PTSL ini juga harus diikuti dengan kegiatan digitalisasi arsip pertanahan guna peningkatan kualitas data bidang tanah yang terdaftar dalam PTSL ini.

Kementerian ATR/BPN telah mencanangkan di dalam *roadmap* 5 tahun kedepan bahwa pada tahun 2021-2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang bertekad mewujudkan pelayanan yang serba elektronik dan pelayanan pertanahan *online*. Namun, melihat fakta di lapangan terkait sulitnya

melakukan pencarian arsip pertanahan, tentunya menjadikan sebuah pertanyaan apakah pelayanan pertanahan *online* ini akan dapat diwujudkan. Ketika arsip pertanahan masih susah untuk ditemukan, adalah hal yang sulit untuk mewujudkan pelayanan pertanahan *online*. Permasalahan terkait dengan pencarian arsip pertanahan diharapkan dapat diselesaikan melalui kegiatan digitalisasi ini.

Kementerian ATR/BPN sebenarnya telah melakukan kegiatan digitalisasi arsip pertanahan sejak tahun 2010 an. Tetapi dalam berjalannya waktu, kegiatan ini tidak berjalan dengan baik. Kembali digalakkan dengan adanya program PTSL. Sebagai wujud nyata aksi, pada 5 Agustus 2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5/SE- 100.TU.02.01/VIII/2019 Tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah. Surat edaran memuat tentang maksud dan tujuan dilakukannya digitalisasi warkah, dasar hukum digitalisasi warkah, dan tahapan kegiatan digitalisasi warkah serta lampiran. Maksud dan tujuan surat edaran ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan digitalisasi dokumen dengan harapan kegiatan digitalisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun tahapan kegiatan yang harus dilalui adalah (1) Persiapan, (2) *Scan* Warkah, (3) *Indexing*, (4) *Quality Control*, (5) Penyimpanan ke dalam *server*, (6) Daftar Arsip Alih Media.

Memasuki era revolusi industri 4.0 ini, kegiatan digitalisasi arsip pertanahan tidak serta merta hanya digitalisasi arsip saja, tetapi perlu diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Sebagai contohnya adalah hasil digitalisasi arsip pertanahan terintegrasi dengan peta bidang tanah yang telah berbasis elektronik dan berbasis bidang. Hal ini tentu saja akan memudahkan dan mendukung Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pelayanan *online* sehingga percepatan pelayanan akan terjadi. Oleh karena itu, hasil dari kegiatan digitalisasi arsip pertanahan akan dilihat keintegrasian dengan peta bidang tanah apakah antara keduanya telah terintegrasi sehingga dapat mendukung pelayanan *online* pertanahan. Selain itu, evaluasi juga akan

dilakukan terhadap pelaksanaan digitalisasi arsip pertanahan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan atau belum dan dapat mengatasi permasalahan terkait arsip pertanahan. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kegiatan Digitalisasi Arsip Pertanahan Dan Integrasinya Dengan Peta Bidang Tanah Menuju Pelayanan *Online* (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)”.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana integrasi digitalisasi arsip pertanahan dan peta bidang tanah menuju pelayanan *online* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar?

C Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam upaya menuju pelayanan *online*.
- b. Melakukan evaluasi digitalisasi arsip pertanahan dan integrasinya dengan peta bidang tanah terintegrasi menuju pelayanan *online* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal mengungkapkan

berjalannya kegiatan digitalisasi arsip pertanahan dan integrasinya dengan peta bidang tanah menuju pelayanan *online*.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengetahui secara mendasar mengenai kegiatan digitalisasi arsip pertanahan yang berjalan khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten/kota dan integrasinya dengan peta bidang tanah dalam upaya menuju pelayanan *online* sehingga dapat memformulasikan kebijakan tentang digitalisasi warkah secara tepat.
- c. Kegunaan bagi masyarakat dengan adanya kegiatan digitalisasi ini adalah adanya kepastian bahwa arsip pertanahan dari bidang tanah yang mereka miliki telah memiliki dokumen elektronik sehingga pelayanan pertanahan secara *online* dapat segera terwujud.

D Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dan juga rujukan peneliti dalam menyelesaikan penelitian serta sekaligus sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti. Berikut ini peneliti memaparkan tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan digitalisasi warkah yang dilakukan di kantor pertanahan.

1. Penelitian pada tahun 2015 yang telah dilakukan oleh Muhammad Teguh Dwi Putranto yang berjudul “Proses Digitalisasi Koleksi Deposit Di UPT Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pedoman standar teknis kerja di UPT Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam proses digitalisasi koleksi deposit serta kriteria-kriteria apa saja yang harus dipenuhi dalam memilih koleksi bahan pustaka tercetak yang akan didigitalisasikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis metode deskriptif dengan kategori studi kasus. Hasil penelitian adalah bahwa diperlukannya penyusunan standar teknis seleksi bahan pustaka secara baku dan tertulis dalam proses

digitalisasi agar kegiatan digitalisasi terstruktur dengan baik dan jelas di UPT Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Penelitian pada tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Ridho Julian Satria yang berjudul “Pemanfaatan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) Untuk Sistem Pengarsipan Warkah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”. Penelitian ini menguraikan pemanfaatan Aplikasi Warkah (i-Wak) untuk membantu pengarsipan warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penyimpanan, pengelolaan, dan penggunaan warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (2) Mengetahui penerapan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) dalam sistem pengarsipan warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa Aplikasi i-Wak berguna untuk meminimalisir resiko kehilangan data terhadap peminjam serta jumlah warkah dan buku tanah yang telah dipinjam dan terbentuk sistem pengarsipan yang baik dan berkualitas untuk mendukung kegiatan pemeliharaan data pertanahan.
3. Penelitian pada tahun 2019 yang telah dilakukan oleh Utami Anggraini dengan judul “Pengelolaan Warkah Digital Dan Prospek Pemanfaatannya (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan warkah digital dan untuk mengetahui prospek pemanfaatannya untuk pelayanan pertanahan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk prospek pemanfaatannya dianalisis dengan analisis SWOT (*Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Penelitian ini menguraikan tentang pengelolaan warkah digital pada Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau menggunakan media Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) dan Sistem Pengelolaan Warkah elektronik (SLOKA ETNIK). Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengelolaan warkah digital pada Kator Pertanahan Kota

Lubuklinggau menggunakan media aplikasi Informasi Warkah (i-Wak). Prospek pemanfaatan dari pengelolaan warkah : 1) Pencarian warkah yang relatif lebih cepat dibandingkandengan cara manual,(2) merupakan kegiatan kroscek data yang ada di aplikasi GeoKKP dengan dokumen yang ada di ruang arsip.

Berdasarkan paparan dari tiga penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ini lebih menekankan pada bagaimana digitalisasi arsip pertanahan dan peta bidang tanah terintegrasi menuju pelayanan *online* dan evaluasi atas kegiatan tersebut.

BAB VII

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Kegiatan digitalisasi arsip pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar :
 - a. Pelaksanaan digitalisasi arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terdapat ketidaksinkronan dengan Surat Edaran Nomor 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 Tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah. Ketidaksinkronan ini berpengaruh terhadap legalitas dari produk hasil digitalisasi utamanya dalam hal kepastian hukum.
 - b. Ketidaksinkronan kegiatan digitalisasi arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan Surat Edaran ini salah satunya dikarenakan Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki pengetahuan tentang kearsipan (arsiparis), sehingga dalam menjalankan kegiatan digitalisasi arsip ini bukan dalam rangka pengelolaan arsip pertanahan, hanya sebagai pekerjaan sampingan sebatas langkah untuk menaikkan progress *dashboard* capaian PTSL.
 - c. Kegiatan digitalisasi arsip pertanahan dapat meminimalisir permasalahan terkait sulitnya melakukan pencarian arsip pertanahan sehingga dapat menyelesaikan agenda Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan pelayanan pertanahan elektronik dan *online*.
2. Belum ada keterkaitan/ integrasi antara kegiatan digitalisasi arsip pertanahan dengan Peta Bidang Tanah untuk menuju pelayanan *online*. Hal ini dilihat dari proses pembuatan Peta Bidang Tanah yang berhenti pada pencetakan Peta Bidang Tanah saja. Tidak ada proses lebih lanjut dari Peta Bidang Tanah secara elektronik/ digital.

B Saran

1. Perlu dilakukan kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan ANRI guna menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan tentang kearsipan yaitu arsiparis yang paham akan ilmu kearsipan.
2. Menggandeng pihak ketiga dalam kegiatan digitalisasi arsip pertanahan ini agar kegiatan ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan cara ini, maka percepatan digitalisasi arsip pertanahan akan tercapai sehingga permasalahan pencarian arsip bisa diminimalisir dan dihilangkan.
3. Perlu adanya sebuah aplikasi guna menghubungkan antara hasil digitalisasi arsip pertanahan dengan peta bidang tanah guna mendukung suksesnya pelayanan *online* pertanahan.

Daftar Pustaka

- Aditya T. 2013. 'Peluang dan Tantangan Integrasi Peta dan Aplikasi Geospasial Melalui Pemetaan Kolaboratif Berbasis SRGI'.
- Amsyah, Z 2005, *Manajemen Kearsipan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Asaniyah, N.2017, 'Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi'. *Buletin Perpustakaan*, vol.57, hlm.85-94.
- Atmoko, P. W., & Si, M. 2015. *Digitalisasi dan Alih Media*. Universitas Bramelati, Malang.
- Badrudin 2015, *Dasar – Dasar Manajemen*, Alfabeta, Bandung.
- Gray, C 2002, *Pengantar Evaluasi Proyek*, PT Gramedia, Jakarta.
- Hakim, Dul T. 2015, *Pengelolaan Arsip di Era Teknologi Informasi*, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11, No.2 Februari Tahun 2015
- ICA, 1997, *Guide For Managing Electronic Record From An Archival Perspective*. Dalam www.ica.org/sites/default/files/ICA_Study_8_guide_eng.
- Jones, T 2001, *An Introduction to Digital Project For Libraries, Museums and Archives*. [Http://www.library.illinois.edu/dcc/resources/introduction.html](http://www.library.illinois.edu/dcc/resources/introduction.html)
- Kuny, T 1995. *Introduction to Digitization Technologies and Challenges*. Canadia Institute For Historical Microre-Prographics. Ottawa.
- Kustanti, Eni dkk 2017, 'Layanan Online Bahan Perpustakaan Nondigital di PUSTAKA', *Media Pustakawan*, vol.24, no.2, hlm 17.
- Manurung, Lisman 2013, 'Peran E-Governmenr dalam reformasi pelayanan public', *Jurnal Kementerian Sekertaris Negara RI*, no.29, hlm. 125.
- Mirmani, A 2014, *Pengantar Kearsipan*, Universitas Terbuka
- Mustopa 2018, 'Digitalisasi Koleksi Karya Sastra Balai Pustaka sebagai Upaya Pelayanan Di Era Digital Natives', *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga*, vol.8, no. 2 Juli-Desember, hlm. 61-68.

- Nashihudin, Wahid dkk 2013, 'Pemanfaatan Layanan Online : Studi Kasus Pada Jasa Meja Informasi dan Penelusuran Informasi PDII-LIPI Tahun 2008-2012', Visi Pustaka, vol. 15, no. 1, 1 April 2013, hlm 44.
- Priansa, D 2014. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Alfabeta, Bandung.
- Putranto, M. T 2015. *Proses Digitalisasi Koleksi Deposit di UPT Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 4(3), 161-170.
- Rahmawati, Alifah N. 2018, 'Manajemen Arsip Elektronik Menggunakan Software Arsip Opendocman', WIPA, vol.22, edisi Januari 2018, hlm.29-39.
- Rifauddin, M. 2016, 'Pengelolaan Arsip Elektronik berbasis teknologi', Khizanah Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, 4(2),171
- Rosalin, S 2017, *Manajemen Arsip Dinamis*, UB Press, Malang.
- Rukajat, A 2018, *Teknik Evaluasi Pembelajaran*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Rustam, M 2014. *Pengelolaan Arsip Elektronik*. Universitas Terbuka, Banten
- Setiono 2002, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, Surakarta
- Siswosoediro, HS 2008, *Buku Pintar Pengurusan perizinan & dokumen*, Visimedia, Jakarta.
- Soerodjo, I 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah*, Arkola, Surabaya.
- Sugiarto, A 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Suparjati dkk, 2000, *Tata Usaha dan Kearsipan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Supriyanto, W 2008. *Teknologi Informasi Perpustakaan : Strategi Perancangan Perpustakaan Digital Yogyakarta(ID)*, Kanisius, Yogyakarta
- Sutedi, A 2011, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Witjaksono, Hendro 2006, 'Good Governance: Tinjauan Konsep dan Penerapannya', Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan, vol. 4, no.1, juni 2006, hlm.86-98.
- Umar, H 2005, *Evaluasi Kinerja Perusahaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wirawan. 2012. *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.

World Bank Grup, 2020, *Doing Business 2020*, International Bank for Reconstruction and Development, Washington.

<http://dpr.go.id/berita/detail/id/24158/t/BPN+Harus+Kembangkan+Pelayanan+Digital> diakses pada 19 Januari 2020 jam 09.22 WIB.

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/digitalisasi-dokumen-pertanahan-kementerian-atrbpn-lakukan-kajian-teknis-99676> diakses pada 19 Januari 2020 pukul 09.20 WIB

<https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/> diakses pada 18 Januari 2020 jam 08.49 WIB

<https://bisnis.tempo.co/read/1076107/presiden-jokowi-luncurkan-roadmap-revolusi-industri-4-0/full&view=ok> diakses pada tanggal 18 Januari 2020

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/babak-baru-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik> diakses pada 19 Januari 2020 jam 09.05

<https://anri.go.id/publikasi/berita/3-mobil-box-berisi-arsip-badan-pertanahan-kota-bekasi-merapat-di-arsip-nasional-ri> diakses pada 20 Januari 2020 pukul 10.00 WIB

<https://properti.kompas.com/read/2020/01/03/190356121/kantor-pertanahan-bekasi-gandeng-anri-selamatkan-arsip-pertanahan>. diakses pada 20 Januari 2020 jam 09.05

<https://www.liputan6.com/properti/read/4150760/kantor-pertanahan-kota-bekasi-terendam-banjir-anri-siap-bantu> diakses pada 20 Januari 2020 jam 09.05

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/gerak-cepat-pemerintah-dalam-inventarisasi-arsip-sertipikat-terdampak-banjir-104687> diakses pada 20 Januari 2020 jam 09.05

<https://omtanah.com/2016/10/20/pengertian-warkah-tanah/> diakses pada 21 Januari 2020 jam 11.59 WIB

<https://www.nla.gov.au/policy-and-planning/collection-digitisation-policy> diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 08.11 WIB

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/hantaru-tahun-2019-momentum-menuju-organisasi-modern-95568> diakses pada 12 Februari 2020 Pukul 11.34 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita diakses pada Tanggal 21 Februari 2020 Pukul 09.30 WIB

https://news.ddtc.co.id/world-bank-rilis-peringkat-kemudahan-berusaha-2020-ini-hasilnya-17558?page_y=2300 diakses pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 11.00 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212110949-4-137215/jokowi-mulai-usaha-di-ri-butuh-13-hari-china-hanya-9-hari> diakses pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 11.00 WIB

www.merriamwebster.com diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 11.00 WIB

<https://properti.kompas.com/read/2020/02/12/192554521/digitalisasi-seluruh-dokumen-pertanahan-tuntas-2024> diakses pada 06 Juli 2020 Pukul 09.48 WIB

https://www.academia.edu/11893360/Materi_Integrasi_dan_Migrasi_Sistem diakses pada 17 Juli 2020 Pukul 13.35 WIB

<https://www.softbless.com/Data-Integration> diakses pada 17 Juli 2020 Pukul 13.35 WIB

Peraturan Perundang - undangan

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang. Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media lainnya dan Legalisasi

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 239);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi
Pertanahan Secara Elektronik

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional

Surat Edaran Nomor 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 Tentang Standarisasi
Digitalisasi Warkah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 Tentang
Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I
Timor Timur Dan Penerbitan Sertipikatnya